

Dua Versi Satu "Fakta" Sejarah?

Hermeneutika sebagai Acuan Kritik Ideologi Sejarah Orde Baru

Alexander Seran

ABSTRAK: Tampaknya pertanyaan tentang Orde Baru tidak lagi fokus pada kapan dimulai tetapi apa dan mengapa Orde Baru itu bisa "berhasil" mengakhiri sebuah rezim (Orde Lama) yang sejak awal, sehari setelah Proklamasi dikumndangkan, yakni 18 Agustus 1945, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi implementor nilai-nilai dasar dan ideologi negara dalam membangun sistem demokrasi yang berkepribadian Indonesia. Dengan demikian pendidikan sejarah nasional tidak secara parsial dan deterministik mematok sebuah momen seakan-akan itulah awal mula sejarah padahal momen itu lebih mendeskripsikan kepentingan penguasa ketimbang apa yang diklaim jati diri bangsa yang seharusnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen (bukan terutama "kemarin" tetapi) hic et nunc (sekarang dan di sini). Filsafat tentang sejarah terletak pada pemikiran di balik apa yang nyata terjadi.

Kata Kunci: Orde Lama, Orde Baru, nilai-nilai dasar, ideologi, pendidikan, sejarah.

ABSTRACT: The question about New Order is longer focused on when it was happened rather on why the New Order regime led by Suharto was successfully put to end the old regime of Sukarno? A philosophy of history tends to seek the insight of an event rather than what has been experienced as a matter of fact. Therefore the reading of national history cannot be confined to the 1965 killing of generals as if it was at all the whole story. If the writing of history was designed to meet the interest of who is actually in power then the truth about history is missing. Hermeneutic interpretation may help to enlarge reflection to keep the truth reveals itself a long the memory that is continuously made present what has to be done and how to prevent society to fall twice in the same hole.

Key Words: Old Regime, New Regime, basic, values, ideology, education, and history.

1. PENDAHULUAN

Bagi orang yang akrab dengan *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa* (PSPB), yang telah menonton film *Pengkhianatan G 30 S PKI* arahan sutradara Arifin C. Noer, dan yang sudah membaca buku *Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* akan memberi jawaban senada yakni, saat Mayor Jenderal (Mayjen) Suharto memimpin penumpasan pelaku Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak 1 Oktober 1965.¹ Setelah limapuluh tahun berlalu, ketika pertanyaan di atas diajukan kembali jawabannya akan lebih bervariasi tetapi juga lebih reflektif mengingat PSPB yang sebelumnya adalah mata pelajaran sejarah yang diwajibkan sekarang tidak diajarkan lagi di Sekolah-sekolah Dasar (SD), Sekolah-sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah-sekolah Menengah Atas (SMA). Film *Pengkhianatan G 30 S PKI* yang sebelumnya ”wajib” tayang setiap menjelang 1 Oktober sebagai persiapan memperingati Hari Kesaktian Pancasila sekarang tidak dilakukan lagi.

Tampaknya pertanyaan tentang Orde Baru tidak lagi fokus pada kapan dimulai, tetapi apa dan mengapa Orde Baru itu bisa ”berhasil” mengakhiri sebuah rezim (Orde Lama) yang sejak awal, sehari setelah Proklamasi dikumandangkan yakni, 18 Agustus 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi implementor nilai-nilai dasar dan ideologi negara dalam membangun sistem demokrasi yang berkepribadian Indonesia. Bukankah Orde Lama telah berhasil melewati saat-saat genting yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melewati siasat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 tetapi menuntut agar bentuk NKRI diubah menjadi Republik Indonesia Serikat

(RIS) serta mengganti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan Konstitusi RIS (1949-1950)? Tidak hanya itu, Orde Lama juga berhasil mempertahankan nilai-nilai dasar dan ideologi Pancasila ketika Konstitusi RIS (1949-1950) serta Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950-1959 berlaku meng-
anut pelaksanaan sistem demokrasi liberal. Kembalinya bentuk NKRI pada tahun 1950 berdasarkan UUDS tidak mengurun niat Orde Lama untuk mem-
pertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai cita-cita pendiri negara dalam Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan PPKI. Kembalinya Indonesia pada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah tekad Orde Lama untuk melaksanakan sistem demo-
krasi yang ”berkepribadian Indonesia” menurut Pancasila dan UUD 1945.

Terlepas dari kapan Orde Baru dimulai, tekadnya sama dengan Orde Lama, yakni melaksanakan sistem demokrasi yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 secara ”murni dan konsekuen”. Sistem demokrasi yang ”berkepribadian Indonesia” dan yang ”murni dan konsekuen” tersebut dikemas dalam teks sejarah yang ditulis berdasarkan cara pandang teori-teori agung ”grand narratives” sehingga terkesan menisbikan realitas dunia kehidupan masyarakat warga negara dalam pluriformitasnya sebagai konteks ”counter-narratives”.² Historisme adalah gaya penulisan sejarah Orde Lama dan Orde Baru yang menekankan teks sejarah sebagai fakta yang telah terjadi di masa lampau maka realitas dunia kehidupan masyarakat warga negara harus dikelola sesuai persepsi rezim penguasa tentang Pancasila sebagai fakta yakni, ”kepribadian Indonesia” atau ”murni dan konsekuen”.

Kini pertanyaan mengenai kepribadian Indonesia yang murni dan konsekuen itu harus diuji melalui penulisan ulang sejarah Indonesia di era

Orde Reformasi. Di sini, paham sejarah yang bersifat deterministik sebagai gaya historiografi modern memerlukan dekonstruksi yang bertujuan untuk melakukan *decentering* proses demokrasi berpusat pada realitas dunia kehidupan masyarakat warga negara bukan pada lembaga-lembaga negara sebagai representasi kehendak publik. Penulisan kembali sejarah harus bertolak dari pengalaman mengenai nilai-nilai universal yang dirumuskan dalam Pancasila dan realitas penghayatan nilai-nilai itu dalam komunikasi dunia kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertautan antara teks dan konteks harus menghidupkan sistem demokrasi secara deliberatif bukan titah dari atas atas nama ”jati diri bangsa” berwujud kehendak penguasa rezim.

Apabila sistem demokrasi deliberatif menjadi landasan klaim nilai-nilai Pancasila, maka perwujudannya adalah pelaksanaan kehendak rakyat melalui pemberdayaan ruang publik wacana sehingga menciptakan masyarakat warga negara yang berkualitas (*robust civil society*) sebagai tulang punggung politik. Dengan kata lain, sistem demokrasi yang dibangun dalam Orde Reformasi, melalui penulisan kembali sejarah Indonesia, menjadi refleksi mengenai pembaruan dan pengembangan ruang publik politik sebagai kondisi aktual keterlibatan masyarakat warga negara dalam pengambilan keputusan politik secara deliberatif.

Orde Lama dan Orde Baru telah berakhir dengan meninggalkan sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila menurut interpretasi kekuasaan mengenai Pancasila sebagai jati diri bangsa yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi dalam kenyataannya jauh panggang dari api. Untuk itu, acuan pembangunan sistem demokrasi Indonesia haruslah tetap berpijak pada Pancasila yang selama ini ditelantarkan artikulasinya di atas level

ideologi yang abstrak karena tidak menyentuh realitas nilai-nilai itu dalam pengalaman masyarakat warga negara. Politik dalam sistem demokrasi dua rezim yang sudah berlalu bersifat deterministik sehingga sesudah rezim berlalu warisan sejarah untuk melanjutkan perubahan dan pengembangan sistem demokrasi tidak terinstitusionalisasi dengan baik di ruang publik. Akibatnya, ganti rezim ganti pijakan sejarah untuk memulai dan bukan melakukan perubahan dan pengembangan sistem demokrasi. Ketidakjelasan mengenai wewenang yang diberi kepada Mayjen Suharto melalui Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) 1966 menimbulkan pertanyaan mengenai batas penggunaan perintah itu dan legitimasi hukumnya bagi sekuen peristiwa politik yang melahirkan Orde Baru. Presiden Suharto mengundurkan diri dari tanggal 21 Mei 1998, diikuti dengan penghentian produk historiografi yang eksis selama Orde Baru berkuasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai orisinalitas sejarah, misalnya apakah benar peristiwa penangkapan dan pembunuhan para jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) adalah murni dilakukan oleh PKI, atau infiltrasi kekuatan asing yang memanfaatkan sentimen anti poros Jakarta dengan negara-negara komunis dunia, atau perpecahan akibat persaingan kekuasaan dalam ABRI sendiri? Mengapa Presiden Sukarno menamakan peristiwa yang diklaim Mayor Jenderal (Mayjen) Suharto dengan nama Gerakan 30 September 1965/ PKI (G 30 S/ PKI) dengan nama Gerakan 1 Oktober 1965 (GESTOK)?³

Tulisan ini bertujuan mengkaji secara kritis paradigma penulisan sejarah Orde Baru (termasuk sejarah Orde Lama dan sejarah Orde Reformasi) yang bertolak dari Pancasila sebagai teori tentang nilai-nilai universal yang dijadikan prinsip bagi pembangunan sistem demokrasi namun melalaikan

pemahaman mengenai nilai-nilai tersebut dalam praksis kehidupan sehari-hari masyarakat warga negara. Akibatnya, Pancasila lebih berperan sebagai ideologi murni di level teori yang abstrak dalam pembangunan sistem demokrasi terpimpin (Orde Lama) dan sebagai ideologi politik di level strategi kekuasaan dalam pembangunan sistem demokrasi Pancasila (Orde Baru). Kedua orde pemerintahan menggunakan Pancasila sebagai acuan pembangunan sistem demokrasi. Orde Lama mengacu pada Pancasila sebagai nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong maka sistem demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi terpimpin sesuai dengan jati diri bangsa bukan demokrasi liberal yang individualistik di belahan dunia Barat. Orde Baru mengacu pada Pancasila yang direstorasi dari penyelewengan pelaksanaannya di era Orde Lama, yakni melaksanaka sistem demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana dijabarkan dalam lima sila sebagai dasar hukum (moralitas) negara dan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar.

Baik demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila tidak berhasil mempertautkan teori tentang nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat warga negara dengan praksis politik dalam sistem demokrasi terpimpin (Orde Lama) maupun demokrasi Pancasila (Orde Baru). Oleh sebab itu, Orde Reformasi harus menggunakan Pancasila sebagai acuan kritik ideologi ketika fakta sejarah ditelaah secara historis-hermeneutis sejauh untuk memahami Pancasila bukan sekedar sebagai hasil penemuan masa lampau tetapi menginterpretasinya dalam konteks perubahan dan pengembangan sistem demokrasi yang mampu mempertautkan teori tentang nilai-nilai universal dalam Pancasila dengan dunia kehidupan masyarakat warga negara.

2. LANDASAN TEORI

Krisis historiografi terletak pada pemilihan teori dan metode penulisan sejarah. Empirisme adalah cara pandang yang menekankan pengalaman sebagai titik tolak pengetahuan. Sejak Francis Bacon (1521-1626) menyatakan "knowledge is power" maka metode empiris memainkan peran dalam penelitian ilmiah dalam menentukan kebenaran pengetahuan berdasarkan fakta yang dapat diobservasi, darinya dirumuskan hukum-hukum universal, yang melahirkan teori yang akan diverifikasi melalui sebuah hipotesa apakah teori tersebut dapat dikonfirmasi oleh kesimpulan yang didapat. Melalui deskripsi tentang ciri-ciri dari apa yang dipermasalahkan atau melalui hubungan sebab-akibat antara sesuatu ditetapkan sebagai sebab dan sesuatu yang timbul sebagai akibat maka sebuah permasalahan dapat diterangkan diterima sebagai kebenaran. Empirisme melahirkan positivisme sebagai cara pandang ilmu-ilmu positif yang menekankan pengetahuan berdasarkan fakta yang dapat diukur secara matematis. Cara pandang ini menisbikan nilai yang melatarbelakangi sebuah peristiwa yang sesungguhnya sangat penting dan menentukan makna dari fakta di masa lampau dan implementasinya pada kehidupan masa kini dan masa depan.⁴

Pengaruh empirisme dan positivisme ini dalam sejarah dalam pandangan yang menekankan fakta di masa lampau, tetapi kurang memberi perhatian pada perubahan nilai dan pengembangannya di masa sekarang dan masa depan. Dalam kaitan dengan sejarah nasional, karya historiografi tidak hanya difokuskan pada fakta masa lampau (historisme) melainkan juga nilai yang terkandung di dalamnya sebagai dorongan untuk melakukan pembaruan dan pengembangan sistem demokrasi. Upaya untuk mengatasi krisis historisme tersebut adalah

memahami sejarah sebagai peristiwa, konteks, dan nilai. Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834) yang di jamannya dipengaruhi oleh metode ilmu pengetahuan empiris dan positivistik namun tidak membatasi karya historiografi pada penulisan teks mengenai fakta masa lalu. Alasannya, metode empiris dan positivistik membatasi kebebasan manusia dalam memahami dan memaknai teks sejarah sebagai fakta ketimbang sebagai konteks historis. Menurutnya, historisme tidak menggali konteks untuk menemukan nilai-nilai yang penting bagi penulisan sejarah. Schleiermacher melihat hermeneutika sebagai metode penulisan sejarah yang lebih akurat dan bermakna karena memberi ruang pada pertautan fakta dan nilai, teks dan konteks, masa kini dan masa lampau sehingga penulis sejarah dapat memungkinkan pemahaman atas sebuah teks secara komprehensif. Sejarahwan Jerman, Wilhelm Dilthey (1833-1911), membenarkan hermeneutika yang dikemukakan Schleiermacher sebagai metode penulisan teks sejarah yang memungkinkan konteks memberi makna/nilai pada fakta.

Dalam kaitan dengan hermeneutika tersebut, Johann Gustav Droysen (1808-1884) membedakan tiga metode yang berbeda bagi penulisan sebuah teks yaitu, *recognising* (digunakan dalam penelitian filsafat, teologi, dan riset yang bersifat spekulatif), *explaining* (digunakan dalam penelitian matematika dan fisika), serta *understanding* (digunakan dalam penelitian sejarah).⁵ Teks sejarah tidak berbicara tentang fakta per se melainkan nilai dari fakta, aktualitas teks dalam sebuah konteks kehidupan masa sekarang dan masa depan. Leopold von Ranke (1795-1886) adalah sejarahwan yang menekankan juga penulisan teks sejarah bertujuan untuk menciptakan pemahaman maka pengalaman akan fakta masa lampau harus mendorong pada refleksi secara kritis, mendalam, dan

komprehensif bagi pemahaman peristiwa masa lalu tersebut bagi kehidupan sekarang dan masa depan. Dengan kata lain, teks sejarah tidak bisa dipahami secara deterministik sebagai pembenaran masa lampau maka anggapan bahwa kebenaran ilmiah hanya berasal dari fakta empiris ditolak.

Dewasa ini, upaya penulisan kembali sejarah Indonesia di era reformasi menghadapi tantangan berupa masih kuatnya paham historisme dalam penulisan sejarah padahal pengaruh globalisasi sedang mengancam hilangnya konsep jati diri negara-bangsa yang didasarkan fakta masa lampau sebaliknya posmodernisme membuka ruang bagi hadirnya berbagai pandangan baru (*small narratives*) yang menimbulkan relativisme dan skeptisisme terhadap tero-teori agung (*grand narratives*). Ada berbagai alasan untuk menolak historisme dan metode empiris-positivistik disebabkan oleh determinisme dalam historisme menitikberatkan fakta masa lampau sebagai model sistem demokrasi dan kurang memberi ruang pada pembaruan dan pengembangan sistem demokrasi berdasarkan realitas dunia kehidupan masyarakat warga negara.

Keberatan terhadap historisme dan metode empiris-positivistik, antara lain disebabkan oleh :

Pertama, paham historisme dan metode empiris-positivistik cenderung melestarikan masa lampau melalui klaimnya tentang peristiwa masa lampau sebagai "fakta" yang menentukan kehidupan masa kini dan masa depan. Klaim ini menjadikan masa lampau itu model atau cermin untuk mengukur dan mengendalikan peristiwa masa kini dan masa depan. Ketika sejarah Indonesia ditulis menurut cara pandang tersebut maka teks sejarah dilepaskan dari konteks sosial politik dan secara deterministik membatasi makna peristiwa sosial dan politik yang terjadi di masa kini dan masa depan. Sejarah Orde Lama dan Orde

Baru ditulis menurut cara pandang historisme dan metode empiris-positivistik tersebut sehingga Pancasila yang dirumuskan sebagai nilai-nilai universal yang hidup dalam masyarakat diacu sebagai model untuk membangun sistem demokrasi dalam rezim Orde Lama dan Orde Baru. Pancasila yang diklaim sebagai jati diri bangsa adalah dasar dan ideologi negara yang digunakan kedua rezim membangun sistem demokrasi terpimpin (1959-1966) dan demokrasi "Pancasila" (1966-1998).

Pemaknaan sistem demokrasi berdasarkan jati diri bangsa dalam nilai-nilai universal Pancasila bukanlah hal yang salah tetapi tidak cukup apabila pendasaran itu secara deterministik tika membuka rung pembaruan dan pengembangan sistem demokrasi yang seharusnya menjadi tujuan teks sejarah bagi masa sekarang dan masa depan. Akibatnya, Pancasila sebagai acuan pembangunan sistem demokrasi tidak mempengaruhi penulisan sejarah yang berorientasi masa depan sebaliknya menjadi sejarah yang melestarikan masa lampau dalam kepemimpinan nasional yang totalitarian dan otoriter dan cenderung mempertahankan kekuasaan mereka atas nama Pancasila.

Kedua, penekanan berlebihan makna sejarah pada masa lampau sebagai fakta membuang ruang bagi kultus individu dan sakralisasi nilai-nilai Pancasila sehingga kehilangan makna kontekstualnya sebagai aktualitas komunikasi dunia kehidupan masyarakat warga negara. Dengan demikian, pembangunan sistem demokrasi berasaskan nilai-nilai universal Pancasila tidak memperat hubungan masyarakat dengan sistem politik tetapi sebaliknya memisahkan. Pemusatan kekuasaan pada tangan penguasa rezim memperlemah sistem demokrasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif (*robust civil society*) dan pengambilan keputusan politik karena negara ditempatkan di

atas masyarakat. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi kemandirian negara-bangsa ketika memasuki era globalisasi yang mengancam eksistensi negara (*the end of the nation-state*).

Ketiga, relativisme yang muncul bersamaan dengan reaksi, skeptisisme, dan kritik terhadap modernisme membuka peluang bagi perlawanan terhadap teori-teori agung (*grand narratives*) seperti historisme yang menjadi kekhasan penulisan sejarah negara-negara bangsa modern. Lahirnya berbagai cara pandang lokal yang menginginkan penghargaan terhadap eksistensi dan jati diri mereka memacu perlawanan cara pandang (*counter-narratives*) lokal terhadap kemapanan teori-teori agung. Situasi ini digambarkan sebagai kelahiran posmodernisme yang menginginkan perubahan dan pengembangan sistem demokrasi deliberatif di mana cerita-cerita kecil (*small narratives*) dari berbagai golongan dianggap “ada” dan berperan menyumbang bagi pembangunan sistem politik yang mempertautkan masyarakat dan negara. Posmodernisme membuka ruang bagi ”perang” ideologi untuk akhirnya tersedia pilihan-pilihan sistem politik dapat disepakati melalui aksi demokrasi yang bersifat deliberatif dan emansipatoris.

Salah satu cara untuk mendorong perubahan dan pengembangan historiografi adalah menjadikan Pancasila sebagai acuan kritik ideologi karena selama Orde Lama dan Orde Baru Pancasila diklaim sebagai jati diri bangsa namun implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak menampakkan jati diri masyarakat warga negara dalam komunikasi dunia kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Pancasila sebagai jati diri bangsa dimanfaatkan secara ideologis dan politis untuk mengamankan *status quo* kepemimpinan politik dalam satu tangan penguasa. Di sinilah letak cita-cita untuk

menulis ulang sejarah Indonesia di era reformasi sebagai teks yang berakar dalam konteks historis dan secara hermeneutis dibedah untuk membongkar simpul-simpul kekuasaan yang “tumpul” terhadap keinginan berubah dan berkembang.

Jacques Derrida (1930-2004) dalam *Writing and Difference* menalar tentang sejarah bukan sebagai masa lampau ditemukan kembali dalam masa kini untuk menentukan masa depan. Sebaliknya, sejarah adalah sebuah interpretasi maka teks sejarah adalah sesuatu yang lain dari apa yang dimaknai sebagai masa lampau. Sejarah adalah interpretasi atas interpretasi karena sumber sejarah (dokumen, arsip, dan cerita lisan) yang dijadikan teks lain dari apa yang diinterpretasikan. Maka, menulis ulang sejarah tidak mengatakan apa-apa mengenai masa lampau *per se*. Dalam penulisan ulang sejarah terjadi dekonstruksi dan *decentering* maka yang lampau dibongkar dan apa yang tadinya di pusat tergusur oleh pandangan baru yang mungkin sebelumnya dianggap remeh tetapi sungguh nyata dan orisinal.⁶ Konsep mengenai penulisan ulang sejarah (*rewriting*) sama sekali tidak mengandung arti repetisi waktu lampau secara linear menjadi sekarang, dan nanti melainkan sebuah dekonstruksi kreatif untuk menghadirkan apa yang sesungguhnya lain dari yang lampau sebagai titik tolak yang dilampaui dan relevan untuk konteks sekarang dan masa depan. Sigmund Freud (1856-1939) telah mengungkapkan hal itu dalam psikoanalisa bahwa menulis ulang adalah menginterpretasi atau *Durcharbeitung* (*working through*) melampaui yang lalu untuk memahami dan memecahkan persoalan sekarang.⁷ Oleh sebab itu, keberanian menulis ulang sejarah adalah upaya menyingkap makna baru melalui interpretasi yang membantu seseorang mencapai kehidupan yang lebih baik sekarang dan di

masa depan. Jean-François Lyotard mengatakan bahwa sebuah karya sejarah menjadi penting bukan karena ketepatan dan kebenaran masa lampainya melainkan maknanya untuk hidup manusia sekarang.⁸

Pancasila sebagai acuan kritik ideologi sejarah dapat diwujudkan melalui metode historis-hermeneutis yang mempertautkan sejarah dan maknanya saat ini dan nanti bagi kehidupan yang lebih baik dalam sistem demokrasi deliberatif. Tujuan dari kritik ideologi adalah pertautan teori dan praksis, teks dan konteks, masa lalu dan relevansi kontekstualnya kini dan nanti. Menurut Jürgen Habermas, kritik ideologi diperlukan apabila ilmu pengetahuan telah kehilangan nilai kritisnya menjadi sebuah dogma yang diterima dan dijalankan begitu saja. Dalam bukunya, *Knowledge and Human Interests*, Habermas mengatakan bahwa apa pun yang diklaim sebagai teori tidak bisa lepas dari praksis dunia kehidupan. Fakta mengenai masa lampau tidak bisa dipahami tanpa menilainya menurut kondisi objektifnya dalam kehidupan sekarang. Dengan kata lain, pengetahuan sejarah tercakup kepentingan kognitif yang terkait dengan kondisi sosial masa kini. Sejarah yang mempelajari kehidupan sosial manusia berlangsung dalam masyarakat masa kini maka media untuk mempraktikkan historiografi adalah komunikasi dan kepentingan kognitif yang tercakup dalam sejarah adalah praksis demokrasi.⁹ Dengan demikian sejarah sebagai masa lampau memuat kepentingan kognitif masyarakat masa kini maka sejarah Indonesia yang ditulis berdasarkan Pancasila harus memiliki keterpautan dengan kepentingan masyarakat dalam sistem politik masa kini. Sejarah sebagai ilmu historis-hermeneutis memerlukan media aksi komunikasi antara masyarakat dan negara untuk menjalin kebersamaan menciptakan solidaritas dan integrasi sosial.¹⁰

3. HISTORIOGRAFI DAN METODOLOGI SEJARAH

Penulisan sejarah Indonesia harus sesuai dengan sistem demokrasi yang ingin dibangun. Apabila sejak pembicaraan para bapa bangsa dalam Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah sistem demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang majemuk sehingga demokrasi liberal yang menonjolkan paham individualisme tidak cocok untuk diadopsi, maka sistem demokrasi yang hendak dibangun sesuai dengan jati diri bangsa harus didefinisikan sesuai kenyataan dunia kehidupan sehari-hari masyarakat warga negara. Apabila hal itu tidak dipahami dengan baik maka penulisan sejarah dan metode yang digunakan tidak akan mampu mendukung sistem demokrasi yang hendak dikembangkan.

Orde Lama (1945-1966), era Orde Baru (1966-1998), hingga era Reformasi (1998-sekarang) masih kuat memperlihatkan pengaruh paham historisme dalam penulisan sejarah dengan akibat perwujudan sejarah nasional lebih bersifat bacaan dan pelajaran mengenai masa lalu : bagaimana Pancasila dilahirkan, apa isinya, dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini semua penting namun hal yang lebih penting dalam penulisan sejarah adalah bukan hanya menyangkut fakta di masa lalu melainkan nilai yang diperlukan sekarang untuk mendorong perubahan dan pengembangan masyarakat dalam sebuah sistem demokrasi yang dicita-citakan.

Tantangan yang dihadapi oleh penulisan sejarah nasional berdasarkan paham historisme adalah globalisasi yang menghilangkan batas-batas negara sehingga formulasi sejarah nasional berdasarkan historisme sesungguhnya telah berada di titik *the end of history*. Lalu apakah masih diperlukan sejarah

nasional yang mengisahkan demokrasi Indonesia menurut jati diri bangsa atau Pancasila ? Historisme sebagai paham sejarah menurut paradigma modernisme dan sebagai sebuah *grand theory* dalam cara pandang modernisme itu kini sudah terkikis oleh relativisme cara pandang posmodernisme. Hadirnya *small narratives* dalam panorama posmodernisme tersebut tidak melupakan Indonesia menghadapi semangat komunitarian di berbagai daerah sebagai ”counter narratives” terhadap teori jati diri Pancasila. Francis Fukuyama dalam *the end of history* mengingatkan bahaya kehilangan jati diri tersebut apabila paham sejarah sebagai ”masa depan” tidak dimulai dengan refleksi danantisipasi terutama ketika orang masih berkuat dalam pemahaman sejarah sebagai ”masa lampau” semata.¹¹

Kuatnya pengaruh oleh teori-teori agung (*grand narratives*) seperti empirisme, positivisme, dan strukturalisme terhadap penulisan sejarah sangat terasa ketika kita membaca sejarah Indonesia dalam tiga masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Penggunaan data empiris sebagai fakta dan metode verifikasi untuk membuktikan kebenaran sejarah sering membuat kita terjebak pada pemahaman sejarah sebagai kebenaran ”masa lampau” dan tidak mengantisipasi nilai sejarah sebagai perubahan dan pengembangan masa sekarang dan masa depan. Melalui deskripsi atau hubungan sebab-akibat, kebenaran masa lampau dideskripsikan dalam pengalaman masa kini untuk mengklaim kebenaran mengenai apa yang dilakukan. Atau melalui hubungan sebab-akibat, apa yang terjadi sekarang dinyatakan benar sebagai akibat hubungannya dengan sebab yang dilukiskan pada apa yang ada di masa lampau.

Orde Lama menggunakan nilai-nilai universal dalam Pancasila sebagai bukti mengenai pencapaian kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka sistem demokrasi terpimpin merupakan wujud sistem politik yang sesuai deskripsi NKRI atau akibat dari pengakuan terhadap NKRI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan mudah logika pembenaran terhadap demokrasi terpimpin berdasarkan Pancasila sebagai jati diri bangsa didaraskan mulai dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan NKRI, Negara Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS (1949-1950), NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950-1959, dan NKRI yang kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno memperkuat pembenaran demokrasi terpimpin bersesuaian dengan sejarah Pancasila dan NKRI maka Dekrit Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 diucapkan sebagai penemuan kembali sejarah revolusi “17 Agustus 1945” dan dalam pidatonya 17 Agustus 1966 Presiden Sukarno mekankan “Jasmerah” yakni, bahwa menjadi bangsa yang besar “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”.

Dengan kesadaran sejarah sebagai masa lampau, Presiden Sukarno menjadikan Pancasila sumber legitimasi demokrasi terpimpin yang mentapkan dirinya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Pemimpin Besar Revolusi, dan Presiden Seumur Hidup. Alhasil, ideologisasi Pancasila itu menghilangkan keterpautannya sebagai sistem demokrasi terpimpin dengan realitas dunia kehidupan sehari-hari masyarakat warga negara.

Orde Baru lahir sebagai tekad untuk merestorasi Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar dengan tujuan memperbaiki dan membangun sistem demokrasi Pancasila yakni, pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, penulisan sejarah Orde

Baru mengikuti langgam bahasa yang sama yakni, membenaran fakta historis berdasarkan teori tentang nilai-nilai universal dalam Pancasila yang diklaim oleh Orde Lama sebagai jati diri dan diklaim Orde Baru sebagai nilai yang harus dijalankan secara murni dan konsekuen. Alhasil, apa yang terjadi sebagai sistem demokrasi Pancasila adalah pelaksanaan demokrasi ”terpimpin” secara terselubung atau atau demokrasi terpimpin dengan nama lain. Hal ini dapat disimak pada kurikulum Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Film Pengkhianatan G 30 S/ PKI, dan Pengangkatan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam TAP MPR No.V/MPR/ 1983. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dipimpin oleh penguasa rezim Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Orde Reformasi (1998-) sebagai sebuah masa transisi tidak langsung memiliki agenda mengenai sistem demokrasi yang secara eksplisit diungkapkan sebagaimana yang terjadi dalam Orde Lama dan Orde Baru. Akan tetapi, sistem demokrasi yang dinyatakan melalui berbagai gerakan yang menuntut pembubaran Orde Baru adalah sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang menekankan keterlibatan masyarakat warga negara dalam wacana ruang publik politik agar berbagai keputusan politik dilakukan oleh lembaga-lembaga publik sesuai dengan kehendak masyarakat warga negara. Melalui Amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan sebanyak empat kelihatan pembaruan dan pengembangan sistem demokrasi Pancasila yang secara eksplisit menekankan deliberasi dan partisipasi masyarakat.¹² Perubahan dan pengembangan konsep historiografi dalam penulisan sejarah di era reformasi harus diarahkan pada perubahan sistem politik secara mendasar adalah penggalangan partisipasi

masyarakat melalui penguatan dunia kehidupan sehari-hari masyarakat warga negara sebagai titik tolak dan tujuan sejarah.¹³

Tujuan kritik ideologi adalah mengurai ”kemacetan” pola pikir dengan melakukan pembongkaran terhadap simpul-simpul kekuasaan yang telah menyalahgunakan Pancasila dengan mereduksikannya atau sebagai ideologi murni atau sebagai ideologi politik yang saling mengeksklusi dan menimbulkan konflik internal. Akibatnya, sejarah Orde Lama tidak ditulis dengan mengantisipasi perubahan dan pengembangannya dalam sebuah orde yang baru di masa depan. Sebaliknya, sejarah Orde Baru ditulis untuk memperkuat eksistensi kekuasaan politik baru dan cenderung mengeliminasi apa yang menjadi warisan sejarah Orde Lama. Akibatnya memang ada pembaruan tetapi tidak ada perubahan dan pengembangan yang mengantisipasi akan datangnya sebuah orde yang baru di masa depan. Oleh sebab itu, penulisan kembali sejarah Indonesia di era reformasi harus diarahkan oleh kesadaran naratif yang berusaha merekonstruksi masa lampau, sekarang, dan masa depan yang termotivasi secara terus-menerus oleh pilihan yang mengutamakan pertautan teori tentang nilai-nilai universal dalam Pancasila dan praksis demokrasi di dalam dunia kehidupan masyarakat warga negara.

Apabila sejarah dipandang sebagai interpretasi atas interpretasi maka perbedaan dalam wujud karya historiografi adalah masalah yang lumrah. Tersedianya sumber-sumber sejarah seperti dokumen, arsip, dan kesaksian lisan yang dijadikan referensi penulisan sejarah Orde Baru terwujud dalam berbagai karya historiografi yang kini akan memasuki usianya yang ke-50 tahun. Lalu, apakah sejarah Orde Baru harus ditulis kembali? Bukankah karya historiografi mengenai Orde Baru adalah penulisan ulang dan interpretasi atas sumber-

sumber sejarah yang juga adalah hasil interpretasi. Kritik ideologi melalui pendekatan historis-hermeneutika mendorong penulisan ulang sejarah sebagai interpretasi atas interpretasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan lebih komprehensif yakni, merestrukturisasi sistem demokrasi menjadi proses politik deliberatif yang melibatkan masyarakat sebagai *civil society* dan negara sebagai pelaku nilai-nilai jati diri bangsa (Pancasila) secara murni dan konsekuen. Dengan demikian Pancasila dapat digunakan sebagai acuan kritik ideologi sejarah Orde Lama dan Orde Baru yang sebelumnya tidak mempraktikkan Pancasila itu sebagai jati diri bangsa secara murni dan konsekuen.

4. PANCASILA SEBAGAI ACUAN KRITIK IDEOLOGI SEJARAH

Frasa “Pancasila sebagai acuan kritik ideologi” berisi kata-kata kunci dari paper ini. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, pada cetakan ke-5 yang diterbitkan oleh PN Balai Pustaka dalam tahun 1976 belum tercantum kata “acuan”.¹⁴ Kata itu baru muncul di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Dalam edisinya yang kelima, tercantum kata “acuan” sebagai kata benda dengan dua arti. **Pertama**, “acuan” berarti “cetakan” (yang digunakan untuk membuat kue atau peluru dsb). Misalnya, acuan sepatu diartikan sebagai alat untuk mengukur bentuk sepatu. **Kedua**, “acuan” diartikan: rujukan, referensi; pola dasar penafsiran yang ditetapkan terlebih dahulu. Kata berimbunan “pengacuan” diartikan: proses, cara, perbuatan mengacu..¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa frasa “Pancasila sebagai acuan kritik ideologi” mengandung arti bahwa Pancasila bukan ide yang mengawang-awang (ideologi murni) sebagaimana yang terjadi di era Orde Lama (1959-1966) dan

bukan siasat politik yang berorientasi melestarikan kekuasaan otoritarian seperti yang terjadi dalam era Orde Baru (1966-1998). Pancasila adalah ideologi yang lahir dari praksis dunia kehidupan masyarakat warga negara sebagai nilai-nilai dasar yang hidup. Pancasila adalah *living constitution* yakni, nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan ideal dari bekerjanya negara hukum yang demokratis.

Klarifikasi dan distingsi di atas sangat penting untuk menghindari timbulnya konsep dan persepsi yang keliru mengenai Pancasila, yang di era reformasi sekarang ini sering disalahartikan sebagai paradigma baru. Kiranya tidak tepat untuk memahami Pancasila sebagai paradigma dalam arti Kuhnian. Menurut Thomas S. Kuhn (1922-1996), dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), paradigma baru timbul sebagai akibat dari adanya anomali ketika ilmu pengetahuan “normal” yang tadinya dijadikan rujukan penelitian ilmiah tidak lagi mampu menjelaskan realitas secara meyakinkan. Apabila anomali semakin banyak maka situasi ilmu pengetahuan normal memasuki krisis yang jika berhasil dilampaui oleh hadirnya cara pandang baru menggantikan cara pandang lama yang sebelumnya berlaku. Jadi, paradigma baru lahir karena krisis diatasi.¹⁶ Pancasila bukan paradigma baru dalam arti Kuhnian justeru karena anomali dan krisis terjadi sebagai absennya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penulisan sejarah yang berorientasi pembaruan dan pengembangan sistem demokrasi.

Pada titik inilah letak pentingnya Orde Reformasi untuk merumuskan acuan reformasi secara “kritis” bukan “dogmatis” pada Pancasila dalam menghadapi dan memecahkan persoalan bangsa dan negara yang sedang dilanda oleh krisis multidimensional. Pengertian “kritis” mengacu pada Pancasila sebagai refleksi mengenai nilai-nilai dasar dunia kehidupan masyarakat warga negara

bukan formalisme moral yang dipaksakan secara dogmatis dalam berperilaku. Dengan itu, Pancasila sebagai “acuan” harus digunakan sebagai alat ukur, rujukan, dan referensi di dalam proses pembaruan dan pengembangan sistem demokrasi secara deliberatif berdasarkan hubungan dialektis nilai-nilai dasar yang menjadi realitas dunia kehidupan masyarakat warga negara dengan sistem politik dan ekonomi yang ingin dibangun dalam era reformasi.

Krisis sistem demokrasi dalam Orde Lama adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin yang mereduksikan nilai-nilai dasar yang bersifat komunikatif dalam Pancasila menjadi titah pemimpin. Orde Baru mereduksi nilai-nilai dasar dalam Pancasila dengan mengarahkan sistem demokrasi menjadi strategi politik hukum yang melanggengkan kepentingan politik penguasa dan kroni-kroninya. Apa yang sudah mulai dan akan terus dilakukan oleh Orde Reformasi dalam pembaruan dan pengembangan sistem demokrasi adalah merestorasi dan merevitalisasi sistem demokrasi deliberatif yang mempertautkan nilai-nilai dasar dunia kehidupan masyarakat warga negara dengan proses-proses politik di ranah administrasi kekuasaan dan pelaksanaan ekonomi.¹⁷ “Restorasi” mengandung arti mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula. Di sini, restorasi sistem demokrasi mengandung makna “pemugaran” bangunan sistem politik sesuai kehendak masyarakat warga negara. Pemugaran menyingkirkan apa yang kurang di masa lampau dan merevitalisasi apa yang masih hidup sebagai jati diri bangsa yaitu nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan, cita-cita, dan tujuan nasional.

Ian Hasketh, dalam artikelnya “The Story of Big History”, melukiskan hakikat dan tujuan penulisan sejarah. Menurutnya, sejarah buku bacaan seperti ilmu alam melainkan pengalaman tentang peristiwa. Membaca buku sejarah

adalah memasuki medan dialog yang mempertautkan teks dan konteks yang berhubungan secara dialektis. Membaca sejarah “...*is not to read a book; the goal is to read the story taking place all around us*”.¹⁸ Dalam sejarah, peristiwa berbicara melalui teks oleh sebab itu kemampuan interpretasi memainkan peran agar nilai peristiwa dapat sampai pada pembaca. Sebuah teks sejarah harus mampu berbicara mengenai sebuah peristiwa bagi kehidupan manusia. Dalam arti ini, sejarah memainkan peran juga terhadap ilmu-ilmu positif yang mempelajari fakta tetap memerlukan interpretasi yang dipengaruhi oleh peristiwa sejarah agar memberi nilai bagi kehidupan manusia.¹⁹ Dorongan terhadap penulisan kembali sejarah Indonesia harus bertolak dari Pancasila sebagai acuan kritik ideologi yang memanfaatkan hermeneutika sebagai metode yang mempertautkan fakta mengenai sistem demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam praksis dunia kehidupan masyarakat warga negara sebagai titik tolak dan tujuan.

4.1. Pancasila sebagai Acuan Kritik Ideologi “Sejarah” Demokrasi Terpimpin

Sejarah mengenai sistem demokrasi terpimpin tidak muncul tiba-tiba sebagai sesuatu yang asing dalam praksis demokrasi di Indonesia selama masa Orde Lama. Penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah langkah politik yang objektif untuk menjaga NKRI dan keberlanjutan sistem demokrasi menurut semangat Pancasila sebagai jati diri bangsa. Presiden Sukarno menyebut momentum itu sebagai penemuan kembali jati diri bangsa yang telah terbentuk dan dicapai melalui revolusi yang menghantarkan Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945.

Sistem demokrasi yang sejak awal dibicarakan oleh Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah demokrasi berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong bukan demokrasi liberal yang individualistik maka nilai-nilai itu dirumuskan dalam lima sila (Pancasila) pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar dan ideologi negara tersebut dalam perjalanan sejarahnya tetap menjadi dasar negara dan konstitusi yakni, NKRI dan UUD 1945 (1945-1949), RIS dan Konstitusi RIS (1949-1950), NKRI dan UUDS (1950-1959), serta NKRI dan UUD 1945 (1959-1966).

Kegagalan Konstituante dan pelaksanaan Pemilu 1955 dijadikan alasan Dekrit Presiden 4 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945 yang dihasilkan sebagai hukum dasar berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Presiden Sukarno menilai kegagalan Konstituante dan Pemilu 1955 adalah sebab dari praksis politik liberal yang sejak awal tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Untuk mengakhiri sistem demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950, Presiden Sukarno memandang perlu untuk mengeluarkan dekrit presiden yang bertujuan mengembalikan sistem demokrasi menurut jati diri bangsa Indonesia adalah demokrasi berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong i.e., demokrasi terpimpin.

Melalui demokrasi terpimpin, Presiden Sukarno memusatkan sistem demokrasi sebagai praksis kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bertepatan dengan situasi politik, perebutan kembali Irian Barat (1962) dan ganyang Malaysia (1963), sistem demokrasi terpimpin secara simbolis diperkuat oleh penciptaan kosakata politik yang

memperkuat kedudukan Presiden Sukarno sebagai Panglima Tetinggi ABRI, Pemimpin Besar Revolusi, dan Presiden Seumur Hidup.

Penciptaan atribut kekuasaan yang berada pada presiden diperlukan untuk memimpin pelaksanaan perang melawan Belanda dalam perebutan kembali Irian Barat dan Serawak melalui ganyang Malaysia yang telah secara sepihak melanggar perjanjian Maphilindo. Dalam sistem demokrasi terpimpin itu, Presiden Sukarno membangun kesatuan aksi rakyat revolusioner sebagai kekuatan nasional bagi penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda dan Serawak dengan Malaysia. Karena kesatuan aksi rakyat revolusioner tidak bisa begitu saja diwujudkan maka Presiden Sukarno menciptakan wadahnya dalam bentuk NASAKOM yakni, kesatuan berbagai aliran politik nasional, agama (Islam) dan komunis. Melalui NASAKOM, PKI yang melakukan pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun dirangkul dan kelompok ini menunjukkan loyaltitas kepada pimpinan nasional dalam upaya untuk merebut kembali Irian Barat serta Serawak dari Malaysia.

Persoalan mengenai perlawanan terhadap Malaysia menurut Presiden Sukarno adalah unjuk kekuatan liberalisme yang berusaha menghancurkan jati diri nilai-nilai kekeluargaan rumpun Melayu yang terikat dalam perjanjian Maphilindo yang ditandatangani di Manila 1963 antara Malaysia, Philippines, dan Indonesia bahwa penyelesaian masalah Sabah (yang diklaim sebagai bagian Filipina) dan Serawak (yang diklaim sebagai bagian Indonesia) akan dilakukan kemudian melalui referendum dengan pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Referendum yang secara sepihak dilakukan Malaysia mencoreng kerukunan sesama rumpun Melayu karena tipu muslihat Inggris. Dengan membelakangi Indonesia, Filipina, dan PBB, Malaysia menjadi antek neoko-

lonialisme, neoliberalisme, dan neoimperialisme yang sudah bersepakat menjalin kerja sama untuk menjadi tuan di negeri-negeri masing-masing dan bukan menjadi budak atau boneka dari penjajah yang berasal dari kerajaan-kerajaan Eropa (Inggris, Spanyol, dan Belanda) di masa lalu. Ide mengenai kebersamaan rumpun Melayu bukanlah sesuatu yang baru karena sudah ada dalam paham Malaysia raya, Indonesia raya, dan *irredenta* "persaudaraan bangsa-bangsa serumpun" yang dilontarkan pahlawan nasional Filipina Joze Rizal.

Pernyataan perang terhadap Malaysia secara tidak langsung adalah perang melawan Inggris dan Blok Barat maka kedekatan PKI dengan Presiden Sukarno secara politik dapat dipahami karena peran PKI sebagai katalisator dalam kerja sama poros komunisme dunia dengan Cina, Uni Soviet, Korea Utara, Kamboja, dan Vietnam. Perlawanan terhadap Malaysia akhirnya juga dilakukan terhadap PBB yang mengingkari janji menjadi pengawas referendum atas persoalan Sabah dan Serawak. Karena PBB tidak konsisten dan malah menerima Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebagai tanggal 31 Desember 1964 maka perlawanan Indonesia terhadap PBB adalah keluar dari keanggotaan dalam badan dunia tersebut pada tanggal 7 Januari 1965 (padahal Indonesia telah menjadi negara anggota ke-60 PBB sejak 28 Desember 1950).

Putusnya keanggotaan Indonesia dalam PBB dan perlawanan terhadap Inggris dan Blok Barat yang mendukung Malaysia memperburuk ekonomi Indonesia sebaliknya memperkuat hubungan Presiden Sukarno dan PKI dalam kerja sama poros komunisme dunia. Dengan merangkul PKI tidak menyatakan bahwa Presiden Sukarno adalah anggota PKI sebaliknya ia adalah seorang nasionalis yang dalam kedudukannya sebagai pengemban amanat

revolusi berada di atas semua golongan politik yang diwadahi melalui NASAKOM. Situasi ini mencitrai megalomania dalam diri Presiden Sukarno sekaligus ketakberdayaannya mengontrol kesatuan nasional, agama, dan komunis melalui retorika Pancasila sebagai jati diri bangsa tidak nyata sebagai praksis dunia kehidupan masyarakat warga negara. Kelemahan megalomania dan absennya aksi komunikatif di akar rumput menimbulkan situasi yang tidak kondusif untuk melanjutkan perang terhadap NEKOLIM. Sebaliknya situasi itu dimanfaatkan untuk memperlemah kepemimpinan revolusioner dan saling curiga antar golongan di masyarakat, masing-masing berdasarkan niat menjaga kepemimpinan revolusioner dalam tangan Presiden Sukarno maka isu mengenai kudeta menjadi "dagangan" paling laris diperjualbelikan antar golongan politik dengan maksud menarik perhatian Presiden Sukarno. Tentu saja rekayasa politik mengacau balau kesatuan revolusioner ini tercipta melalui otak dan tangan trampil yang memahami terbatasnya sistem demokrasi terpimpin untuk bertahan ketika rakyat melarat secara ekonomi dan politik semakin represif. Meletusnya peristiwa pada larut malam Kamis 30 September atau dini hari Jumat 1 Oktober 1965 adalah buah dari situasi yang dilkiskan di atas yang intinya adalah diskrepansi nilai-nilai universal dalam Pancasila pada level teori demokrasi terpimpin dengan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat warga negara.

4.2. Pancasila sebagai Acuan Kritik Ideologi "Sejarah" Demokrasi Pancasila

Pagi hari Jumat 1 Oktober 1965 seluruh negeri dikejutkan dengan peristiwa berdarah penangkapan dan pembunuhan enam perwira tinggi TNI

AD yang diisukan masuk dalam daftar “Dewan Jenderal” yang merencanakan kudeta terhadap Presiden Sukarno pada tanggal 5 Oktober 1965. Pelaku peristiwa adalah Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Untung bin Syamsuri yang memimpin Pasukan Kawal Kehormatan Tjakrabirawa menangkap dan membunuh para jenderal. Kejadian ini menunjukkan bahwa kesatuan komando dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) telah disusupi oleh pertarungan kekuasaan politik maka doktrin netralitas ABRI terkooptasi oleh kepentingan politik praktis sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang haus kekuasaan untuk mencari popularitas dan merebut perhatian dari penguasa rezim Orde Lama. Hal itu nyata dari keterlibatan tidak sedikit anggota ABRI dari berbagai angkatan secara samar atau terang-terangan menjadi elit dan kader PKI untuk melindungi revolusi dan mengamankan kepemimpinan Presiden Sukarno.²⁰

Isu mengenai “Dewan Jenderal” menunjukkan perpecahan dalam tubuh ABRI antara yang pro revolusi atau mengikuti Presiden Sukarno dan kontra revolusi atau melawan Presiden Sukarno. Tindakan sepihak yang dilakukan Letkol. Inf Untung bin Syamburi dari satu TNI AD terhadap enam anggota “Dewan Jenderal” dari kesatuan yang sama sejalan dengan apa yang dipersiapkan oleh PKI yakni, membangkitkan rakyat terlatih revolusioner sebagai Angkatan ke-5 di samping ABRI untuk mendukung suksesnya revolusi melawan NEKOLIM. Hal ini terbukti karena beberapa jam setelah pembantaian para jenderal diumumkan “Dewan Revolusi” 1 Oktober 1965 dengan Komandan Tertinggi adalah Letkol Inf. Untung bin Syamsuri.

Peristiwa penangkapan dan pembantaian enam jenderal TNI AD oleh Presiden Suharto yang ketika itu memegang kendali komando di Angkatan

Darat (karena Jend AH Nasution mengalami cedera serius dalam peristiwa tersebut) dinyatakan sebagai usaha kudeta yang gagal. Dengan pernyataan ini, asumsi bahwa Presiden Sukarno terlibat dianulir karena tidak mungkin bahwa Presiden Sukarno ikut dalam gerakan yang akan mengkudeta dirinya sendiri. Alasan yang lain yang menganulir keterlibatan Presiden Sukarno adalah kepengurusan dalam Dewan Revolusi tidak mencantumkan nama Presiden Sukarno bahkan ketika Mayjend Suharto sudah menguasai situasi para pelaku dan pendukung gerakan yang mendekati Presiden Sukarno untuk meminta perlindungan tidak memperoleh dukungan. Lebih dari itu, Presiden Sukarno tidak berada di sebuah tempat yang ditentukan dan dijaga oleh pelaku gerakan agar segera menerima laporan usai tugas pembantaian para jenderal selesai dilaksanakan. Menurut kesaksian lisan, Presiden Sukarno menerima laporan dari para ajudan dan ketika itu beliau menginap di rumah kediaman isterinya Dewi di Slipi.²¹ Dan lebih dari itu, Presiden Sukarno tidak menduga keterlibatan PKI dalam gerakan kecuali membiarkan proses hukum akan menentukan maka ia konsisten menamakan peristiwa itu sesuai kronologi peristiwa, 1 Oktober 1965 tanpa embel-embel PKI sebagai pelaku. Oleh sebab itu, anatomi mengenai pelaku gerakan ditunggu sampai menjadi jelas oleh penelitian dan ketika tuntutan rakyat semakin santer mengenai keterlibatan PKI maka Presiden Sukarno mulai mempertimbangkan pembubaran PKI.²²

Kesaksian Jend. A.H. Nasution yang membenarkan tindakan Mayjen Soeharto kala itu membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 (sehari setelah menerima mandat Presiden Sukarno dalam bentuk Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) dapat disimpulkan bahwa gerakan itu sebagai percobaan kudeta yang didalangi PKI dan Mayjen Soeharto mengambil

momentum yang tepat memenuhi keinginan rakyat membubarkan PKI lepas dari keinginan dan persetujuan Presiden Sukarno. Dalam kedudukannya sebagai pemegang SUPERSEMAR, Letnan Jenderal (Letjen) Soeharto kemudian diangkat sebagai Ketua Presidium yang memimpin kabinet (1967) karena Presiden Sukarno berada dalam kondisi berhalangan tetap. Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang mendengarkan Pidato Presiden Sukarno yang diberi judul NAWAKSARA (Sembilan ucapan) itu ditolak oleh MPRS dan menetapkan Jenderal Suharto sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia.

Itulah awal mula Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengawali sejarah Orde Baru sebagai cita-cita dan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Cita-cita dan tekad tersebut masih berada di aras dan langgam politik yang sama yakni, menggunakan Pancasila sebagai landasan sistem demokrasi namun tidak menemukan kembali nilai-nilai Pancasila dalam realitas praksis masyarakat warga negara untuk dipertautkan dengan sistem demokrasi dalam pengambilan keputusan politik. Sistem demokrasi Pancasila yang diklaim murni dan konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945 pada kenyataannya jauh panggang dari api karena tidak merevolusi perubahan dan pengembangan sistem demokrasi sesuai kondisi aktual masyarakat yang telah berubah. Penggunaan Pancasila sebagai ideologi politik melahirkan mekanisme demokrasi yang berorientasi pada pembangunan sistem sistem politik untuk mempertahankan status quo sehingga kehendak publik tidak sungguh-sungguh diproses dalam ruang publik melalui kebebasan ekspresi bagi perumusan kebijakan-kebijakan publik yang pro rakyat. Kultus individu yang ditolak pada Orde Lama tampil kembali dalam

wajah baru rezim Orde Baru dalam berbagai rumusan politik kurikulum melalui PSPB dan penonjolan peran Presiden Suharto sebagai penumpas PKI dan mengembalikan kesaktian Pancasila yang dirayakan setiap tahun menjelang 1 Oktober melalui pemutaran film Pengkhianatan G 30 S PKI hingga di akhir Orde Baru Presiden Suharto dikukuhkan melalui Ketetapan MPR menjadi Bapak Pembangunan Indonesia senada dengan penokohan Presiden Sukarno dalam Ketetapan MPRS sebagai pemimpin Besar Revolusi di akhir masa Orde Lama. Keroposnya sistem demokrasi yang didasarkan pada teori mengenai nilai-nilai universal dalam Pancasila adalah absennya implikasi praktis mengenai pelaksanaan nilai-nilai itu sesuai realitas yang hidup dalam masyarakat warga negara. Diskrepansi itulah yang menguras daya tahan Pancasila sebagai sistem demokrasi yang tidak merefleksikan jati diri bangsa dalam pemerintahan Orde Lama dan tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen sebagaimana terjadi dalam pemerintahan Orde Baru.

4.3. Pancasila sebagai Acuan Kritik Ideologi “Sejarah” Demokrasi Deliberatif

Krisis moneter (1997-1998) menghasilkan krisis multidimensional (1999) hingga sekarang mengharuskan penulisan ulang sejarah berdasarkan Pancasila untuk membarui perubahan dan pengembangan sistem demokrasi deliberatif sebagai jati diri bangsa (musyawarah untuk mufakat) dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat warga negara yang aktif sebagai *civil society* berpadanan dengan lembaga-lembaga politik dalam aksi komunikasi yang mengerucut pada pengambilan keputusan sesuai kehendak masyarakat warga negara.

Pendekatan historis-hermeneutis atas sejarah menekankan manusia sebagai *homo narrans*. Dalam perspektif ini, manusia adalah penutur dan penulis sejati sejarah nasional maka proses-proses naratif dalam dunia kehidupan masyarakat sebagai warga negara dengan berbagai perbedaan cara pandang harus mencapai sebuah titik temu sebagai *modus vivendi* yang disepakati.²³ Dengan kata lain, kondisi ruang dan waktu kehidupan masyarakat memberi arah dan menentukan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, seorang penulis sejarah menempatkan diri sebagai representasi masyarakat dalam mengonstruksikan teks menurut konteks sosial tertentu. Walter R. Fisher dalam bukunya *Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value, and Action* (1989) mengemukakan bahwa untuk memahami manusia, tentang apa yang dipikirkan dan dilakukannya, seorang penulis harus bertolak dari apa menjadi cerita yang bertumbuh dari dan di dalam masyarakat tertentu. Penguasaan terhadap proses-proses naratif yang berlangsung dalam masyarakat menentukan kualitas sejarawan menghasilkan karya historiografi yang memenuhi syarat: koherensi (*coherence*) dan keterpercayaan (*reliability*). Koherensi adalah masalah konsistensi dalam alur cerita, apakah masuk akal serta memiliki alasan yang mencukupi bagi pemahaman hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya dalam membentuk sebuah narasi. Keterpercayaan berhubungan dengan kebenaran sebuah cerita apakah nyata, relevan, memperkuat nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Apabila, nilai narasi konsisten dengan apa yang hidup dan dihayati dalam masyarakat maka sejarah yang dihasilkan sebagai sebuah teks membuka perspektif bagi perjuangan sebuah nilai yang lebih tinggi yang didambakan oleh seluruh masyarakat.

Apabila Orde Lama dan Orde Baru membatasi proses naratif pada penciptaan sistem demokrasi menurut paham masa lalu, maka Orde Reformasi harus membongkarnya dan mengarahkan proses naratif pada sistem demokrasi deliberatif sebagai hasil komunikasi dunia kehidupan yang menyatakan kebutuhan nyata masyarakat masa kini dan masa depan. Hans Georg-Gadamer menyebut pertautan berbagai cara pandang dalam menghasilkan pemahaman bersama sebagai *fusion of horizon*. Dengan kata lain, makna sebuah teks dipahami berdasarkan hubungannya dengan teks yang lain dalam sebuah konteks yang lebih luas. Proses naratif yang menghasilkan pemahaman bersama untuk menjalani dunia kehidupan sosial sebagai solidaritas adalah inti dari sistem demokrasi yang harus didasarkan pada nilai-nilai universal dalam Pancasila. Makna menunjukkan aspek temporal dari sebuah “plot” teks yang menyatakan dimensi waktu sedangkan plot atau teks menyatakan dimensi ruang. Maka, sebuah narasi memiliki makna jika kita memahaminya dalam sebuah konteks historis dan ruang sosial dengan segala kompleksitas nilai di dalamnya.²⁴ Waktu dan ruang adalah kategori pemaknaan maka peristiwa 1 Oktober 1965 bukanlah suatu kejadian yang muncul tiba-tiba dari sebuah ruang hampa. Sebaliknya peristiwa 1 Oktober 1965 adalah sebuah sejarah yang merentangkan fakta di ruang sosial sebagai nilai kehidupan bersama. Dalam dimensi waktu, tulisan mengenai peristiwa 1 Oktober 1965 adalah ingatan (temporal remembrance) mengenai sebuah model kehidupan sosial politik yang pernah terjadi. Melalui tulisan, kita bisa menangkap makna sebagai tiruan yang dinyatakan oleh teks. Sebuah teks adalah hasil dari proses naratif untuk menafsir makna sebuah peristiwa sebagaimana adanya. Mengikuti cara berpikir Platonik, narasi adalah tiruan yang mengartikulasikan apa yang nyata

terjadi. Supaya narasi merefleksikan apa yang menjadi kenyataan maka proses naratif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kemampuan untuk mengartikulasi ujud hakiki peristiwa semacam itu mensyaratkan kompetensi komunikasi yakni, kemampuan berbahasa yang melekat konteks budaya dan politik.²⁵ Sebagai ujud Sumber-sumber tersebut di atas membantu kita memahami makna dari peristiwa itu dengan lebih baik. Dalam perwujudannya, sebuah konsep memerlukan bahasa sebab tanpa bahasa sebuah proses naratif tidak akan sampai pada perumusan konsep dan perwujudannya dalam bentuk tulisan, artifak, dan seremoni.²⁶ Dari sumber-sumber di atas, kita bisa memahami peristiwa 1 Oktober 1965 dari dua sisi sebagai: fakta dan nilai, hukum dan moral, dan dalam konteks sosial politik apa suatu proses naratif dibuat.²⁷ Menurut Walter R. Fisher, pengagas pendekatan naratif, menegaskan bahwa logika naratif bersifat *all-encompassing* maka sebuah fakta tidak bisa diterangkan hanya menurut hubungan sebab-akibat melainkan hubungan-hubungan nilai-nilai sosial politik yang hidup di masyarakat sebagai naratif ketimbang metafor.²⁸

5. PENUTUP

Kebutuhan akan penulisan ulang sejarah telah dilakukan dalam kalangan yang terbatas. Dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa secara murni dan konsekuen maka penulisan sejarah di era Orde Lama dan Orde Baru harus dibaharui dan dikembangkan dalam Orde Reformasi sekarang ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Osmiati mengenai struktur Kurikulum Sejarah Orde Lama (1947, 1952 dan 1964) dan Kurikulum Orde Baru

memperlihatkan perbedaan tujuan. Kurikulum Sejarah Orde Lama menekankan kebangkitan kesadaran nasional melalui pendidikan karakter (*nation and character building*). Sebaliknya Kurikulum Sejarah Orde Baru (1968, 1975, 1984, dan 1994) menekankan efisiensi proses dan efektivitas hasil demi menunjang dan memenuhi kebutuhan rezim Orde Baru dalam melakukan pembangunan ekonomi. Yang sama pada keduanya adalah fokus mengenai model pendidikan adalah Pancasila sebagai fakta historis yang ditemukan di masa lalu menjadi cermin pembangunan karakter manusia masa kini dan masa depan. Kelemahannya adalah pemahaman mengenai Pancasila sebagai fakta masa lampau bersifat deterministik sehingga implementasinya dalam konteks masyarakat warga negara dalam kekinian sejarahnya tidak diakomodasi dengan baik dalam penulisan sejarah.

Akibatnya, nilai-nilai jati diri bangsa yang sesungguhnya hidup sebagai realitas pengalaman masyarakat warga negara terabaikan sebagai titik tolak refleksi dan implementasi. Kesannya Pancasila lebih bernilai sebagai ideologi dan teori yang memberi pedoman perilaku tetapi bukan perilaku itu sendiri sebagai praksis nilai-nilai jati diri yang orisinal bertumbuh dan terpelihara dalam dunia kehidupan. Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1999 diharapkan melakukan pembaruan Kurikulum Sejarah yang menekankan perubahan dan pengembangan karakter.²⁹ Dengan demikian pendidikan sejarah nasional tidak secara parsial dan deterministik mematok sebuah momen seakan-akan itulah awal mula sejarah padahal momen itu lebih mendeskripsikan kepentingan penguasa ketimbang apa yang diklaim jati diri bangsa yang seharusnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen (bukan terutama "kemarin" tetapi *hic et nunc* (sekarang dan di sini).@

CATATAN AKHIR

¹ Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI: Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal., 103ff.

² M. Sastrapratedja, “Pancasila dan Identitas Nasional” dalam *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia* (Jakarta : Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013), hal., 7-10.

³ *Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku* (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), hal., 71-72.

⁴ T. M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, “Teori Paradigma dan Relativisme Historis” dalam *Filsafat Ilmu Pengetahuan: H Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Kritik terhadap Visi Positivisme Logis serta Implikasi Pengaruhnya* (Jakarta: Pen. Kompas, 2015), hal. 152.

⁵ Johann Gustav Droysen, *Grundriss der Historik* (Verlag von Veit & Comp., 1868), hal., 11.

⁶ Jacques Derrida, ”Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences” dalam *Writing and Difference*, diterjemhkan oleh Alan Bass dari teks berbahasa Prancis *L'écriture et la différence* (London and New York: Routledge & Kegan Paul Ltd: The University of Chicago, 1978), hal. 351-370.

⁷ Jean-Fançois Lyotard, “Re-writting Modernity” dalam *The Inhuman: Reflections On Time*, diterjemahkan oleh Geoffrey Bennington dan Rachel Bowlby dari teks berbahasa Prancis *L'Inhuman: Causeries sur le temps* (Stanford, California: Stanford University Press, 1988), hal. 24-35.

⁸ Jean-Fançois Lyotard, “A Postmodern Fable” dalam *Postmodern Fables*, diterjemahkan oleh Georges va Den Abbeele dari teks berbahasa Prancis *Moralites postmodernes* (Mineapol, London : Uiversity o Minessota Press, 2nd ed.,1999), hal. 83-102.

⁹ Jürgen Habermas, *Knowledge and Human Interests* , diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Erkenntnis und Interesse* (1968) oleh J.J. Shapiro (Boston: Beacon Press, 1977), Bagian 1, hlm. 3ff. Bdk. T. M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, “Teori Paradigma dan Relativisme Historis” dalam *Filsafat Ilmu Pengetahuan: H Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Kritik terhadap Visi Positivisme Logis serta Implikasi Pengaruhnya* (Jakarta: Pen. Kompas, 2015), Bab 5.

¹⁰ Jürgen Habermas, “Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on John Rawls’s Political Liberalism” dalam *The Journal of Philosophy*, Vol. 92, No. 3 (Mar., 1995), hal. 109-131. Published by: Journal of Philosophy, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2940842> . Accessed: 12/07/2013 08:42. Bdk. C. Fred Alford dalam artikelnya “Is Jürgen Habermas’s Reconstructive Science Really Science?” dalam *Theory and Society*, Vol. 14, No. 3 (May, 1985), hal. 321-340. Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/657118> Accessed: 29/11/2010 21:4.

¹¹ Francis Fukuyama, “Gagasan untuk Sejarah Universal” dalam *The End of History and the Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, diterjemahkan oleh M.H. Amrullah (Yogyakarta: Pen Qalam, 1999), hal., 5-16, 95ff. Bdk. Jürgen Habermas, *The Postnational Constellation: Political Essays*, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Die postnationale Konstellation: Politische Essays* oleh Max Pensky (Cambridge: MIT Press, 2002).

¹² Sejak reformasi 1998, Amandemen atas UUD 1945 telah belangsung sebanyak empat kali. Perubahan Pertama, 19 Oktober 1999 berfokus pada pemisahan kekuasaan legislatif dari kekuasaan eksekutif Perubahan Kedua, 18 Agustus 2000 berfokus pada hak-hak warga Negara, otonomi daerah, dan hak-hak asasi manusia Perubahan Ketiga, 9 November 2001 berfokus pada kedaulatan rakyat dengan akibat peluang untuk menduduki jabatan presiden tanpa diskriminasi serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sebagai konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat (MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi Negara). Perubahan Keempat, 10 Agustus 2002 berfokus pada hubungan konstitusional antar lembaga tinggi negara untuk melakukan checks and balances, akibatnya dihapuskan lembaga tinggi Negara Dewan Pertimbangan Agung. Lihat Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002* (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005), hal. 64.

¹³ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des rechts und des demokratischen Rechtsstaats* oleh William Rehg (Cambridge: Polity Press., 1996), hal. 275.

¹⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet.V, 1976).

¹⁵ Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kelima, 2002).

¹⁶ T. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: Chicago University Press, 1970), hal. 145-146. Bdk T. M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, “Teori Paradigma dan Relativisme Historis” dalam *Filsafat Ilmu Pengetahuan: H Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Kritik terhadap Visi Positivisme Logis serta Implikasi Pengaruhnya* (Jakarta: Pen. Kompas, 2015). Op.Cit.

¹⁷ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, vol. 2, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* oleh Thomas MacCarthy (Boston: Beacon Press, 1987). Bdk. Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Strukturwandel der Öffentlichkeit* oleh Thomas Burger dan Frederick Lawrence (Cambridge, Mass: MIT Press, 1989).

¹⁸ Ian Hesketh, “The Story of Big History” dalam *History of the Present: A Journal of Critical History*, Vol. 4, No. 2 (Fall 2014), hal. 171. Published by: University of Illinois Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.5406/historypresent.4.2.0171>. Accessed: 16/02/2015 04:44.

¹⁹ Ibid., hal.,172.

²⁰ Hendro Subroto, “Angkatan V” dalam *Dewan Revolusi PKI: Menguak Kegagalannya Mengkomunikasikan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 2007), hal.,181-184.

²¹ *Antara Fakta dan Rekayasa...*Op.Cit., hal., 64ff.

²² Ibid., hal., 67.

²³ John Watkins, “Methodological Individualism and Social Tendencies” dalam Richard Boyd, et al (eds), *The Philosophy of Science* (Cambridge: The MIT Press, 1991), hal., 733-42.

²⁴ Paul Ricoeur, dalam bukunya *Time and Narrative* mengatakan bahwa makna setiap peristiwa ditemukan pada level analisa teks (bukan metaphor) maka proses naratif yang diungkap oleh penulis menentukan makna atas sebuah peristiwa.

²⁵ Fisher, Walter R. *Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value, and Action* (Columbia: University of South Carolina Press, 1989).

²⁶ Wilhelm von Humboldt, "Foundation: Language, understanding, and the Historical World" dalam Kurt-Mueller-Vollmer (ed.), *The Hermeneutics Reader* (New York: Continuum, 2000), hal., 98-118.

²⁷ Assnat Bartor, "Reading Biblical Law as Narrative" dalam *Prooftexts*, Vol. 32, No. 3 (Fall 2012), p. 292. Published by: Indiana University Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.2979/prooftexts.32.3.292>. Accessed: 16/02/2015 04:02.

²⁸ Paul Ricoueur, *Time and Narrative*, vol.2., diterjemahkan oleh Kathleen McLaughlin dan David Pellauer (Chicago: University of Chicago Press, 1986).

²⁹ Osmiati, "Pendidikan Di Indonesia: Sejarah Kurikulum Dan Kurikulum Sejarah Masa Orde Baru Dan Reformasi" dalam *Analisis Sejarah*, Volume 4, No. 2 (2014), hal. 69. Universitas Andalas.

KEPUSTAKAAN

Alford, C. Fred dalam artikelnya "Is Jürgen Habermas's Reconstructive Science Really Science?" dalam *Theory and Society*, Vol. 14, No. 3 (May, 1985). Published by: SpringerStable URL: <http://www.jstor.org/stable/657118> Accessed: 29/11/2010 21:41.

Bartor, Assnat "Reading Biblical Law as Narrative" dalam *Prooftexts*, Vol. 32, No. 3 (Fall 2012). Published by: Indiana University Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.2979/prooftexts.32.3.292>. Accessed: 16/02/2015 04:02.

Derrida, Jacques "Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences" dalam *Writing and Difference*, diterjemhkan oleh Alan Bass dari teks berbahasa Prancis *L'écriture et la différence* (London and New York: Routledge & Kegan Paul Ltd: The University of Chicago, 1978).

Droysen, Johann Gustav, 1868. *Grundriss der Historik*, Verlag von Veit & Comp.

Fisher, Walter R. 1989, *Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value, and Action*, Columbia: University of South Carolina Press.

ALEXANDER SERAN – DUA VERSI SATU "FAKTA" SEJARAH?
HERMENEUTIKA SEBAGAI ACUAN KRITIK IDEOLOGI SEJARAH ORDE BARU

- Fukuyama, Francis, 1999. "Gagasan untuk Sejarah Universal" dalam *The End of History and the Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, diterjemahkan oleh M.H. Amrullah, Yogyakarta: Pen Qalam.
- Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku*, 1999. Yogyakarta: CV Adipura.
- Humboldt, Wilhelm von, 2000. "Foundation: Language, understanding, and the Historical World" dalam Kurt-Mueller-Vollmer (ed.), *The Hermeneutics Reader*, New York: Continuum.
- Habermas, Jürgen, 1968. *Erkenntnis und Interesse*, diterjemahkan oleh J.J. Shapiro, 1977. *Knowledge and Human Interests*, Boston: Beacon Press.
- Habermas, Jürgen "Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on John Rawls's Political Liberalism" dalam *The Journal of Philosophy*, Vol. 92, No. 3 (Mar., 1995). Published by: Journal of Philosophy, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2940842> .Accessed: 12/07/2013 08:42.
- Habermas, Jürgen, 2002 *The Postnational Constellation: Political Essays*, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Die postnationale Konstellation: Politische Essays* oleh Max Pensky. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, Jürgen, 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des rechts und des demokratischen Rechtsstaats* oleh William Rehg, Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen, 1987. *The Theory of Communicative Action: Life-world and System, a Critique of Functionalist Reason*, vol. 2, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft* oleh Thomas MacCarthy, Boston: Beacon Press.
- Habermas, Jürgen, 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, diterjemahkan dari teks berbahasa Jerman *Strukturwandel der Öffentlichkeit* oleh Thomas Burger dan Frederick Lawrence, Cambridge, Mass: MIT Press.

- Hesketh, Ian “The Story of Big History” dalam *History of the Present: A Journal of Critical History*, Vol. 4, No. 2 (Fall 2014). Published by: University of Illinois Press. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.5406/historypresent.4.2.0171>. Accessed: 16/02/2015 04:44.
- Kuhn, T.S, 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: Chicago University Press.
- Lyotard, Jean-Fançois, 1988. “Re-writing Modernity” dalam *The Inhuman: Reflections On Time*, diterjemahkan oleh Geoffrey Bennington dan Rachel Bowlby dari teks berbahasa Prancis *L’Inhuman: Causeries sur le temps*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Lyotard, Jean-Fançois, 2nd ed., 1999, “A Postmodern Fable” dalam *Postmodern Fables*, diterjemahkan oleh Georges va Den Abbeele dari teks berbahasa Prancis *Moralites postmodernes*, Mineapol, London : University of Minnesota Press.
- Marsono, 2005. *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, Jakarta: CV Eko Jaya.
- Osmiati, ”Pendidikan Di Indonesia: Sejarah Kurikulum Dan Kurikulum Sejarah Masa Orde Baru dan Reformasi” dalam *Analisis Sejarah*, Volume 4, No. 2 (2014). Universitas Andalas.
- Poespowardojo T. M. Soerjanto dan Alexander Seran, 2015. “Teori Paradigma dan Relativisme Historis” dalam *Filsafat Ilmu Pengetahuan: H Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Kritik terhadap Visi Positivisme Logis serta Implikasi Pengaruhnya*, Jakarta: Pen. Kompas.
- Poerwadarminta, WJS, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet.V., Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricoeur, Paul, *Time and Narrative*, 1986 vol.2., diterjemahkan oleh Kathleen McLaughlin dan David Pellauer, Chicago: University of Chicago Press.
- Sastrapratedja, M., 2013. “Pancasila dan Identitas Nasional” dalam *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*, Jakarta : Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila.
- Singh, Bilveer, 1995. *Dwifungsi ABRI: Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

ALEXANDER SERAN – DUA VERSI SATU ”FAKTA” SEJARAH?
HERMENEUTIKA SEBAGAI ACUAN KRITIK IDEOLOGI SEJARAH ORDE BARU

Subroto, Hendro, 2007. “Angkatan V” dalam *Dewan Revolusi PKI: Menguak Kegagalannya Mengkomunikasikan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Watkins, John, 1991. “Methodological Individualism and Social Tendencies” dalam Richard Boyd, et al (eds), *The Philosophy of Science*, Cambridge: The MIT Press.